

Pengalaman Komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien Pemasyarakatan dalam Proses Bimbingan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi

Nike Nofianti¹⁾, Elva Ronaning Roem²⁾

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas
Email; nikenofianti@gmail.com, elvarona80@gmail.com

Abstrak

Pengulangan tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah *Residivis* semakin marak terjadi. Hal ini menjadi suatu perhatian khusus bagi aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Pemasyarakatan. Pemasyarakatan yang menjadi sorotan disini adalah Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. PK merupakan petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Selama pelaksanaan proses pembimbingan, komunikasi berperan penting terhadap keberhasilan suatu bimbingan. Pengalaman komunikasi PK dengan klien pemasyarakatan dalam proses bimbingan merupakan pengalaman yang layak diteliti. Adapun tujuan penelitian adalah bagaimana komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan klien pemasyarakatan selama pelaksanaan proses pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi Edmund Husserl. Proses pembimbingan yang dilakukan kepada klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi memiliki tujuan salah satunya agar klien pemasyarakatan dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dengan baik serta tidak mengulangi tindak pidana. Komunikasi yang dibangun dalam proses bimbingan adalah komunikasi interpersonal. Keberhasilan dalam membentuk komunikasi interpersonal terdapat pada komunikator dalam hal ini adalah PK. PK harus mampu membangun kedekatan agar proses bimbingan berjalan dengan baik sehingga dapat membawa perubahan terhadap klien pemasyarakatan sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kualitas PK, sehingga dapat memberikan pengalaman yang terbaik juga untuk klien pemasyarakatan yang memerlukan bimbingan. Sebab sumber daya manusia PK yang berkualitas akan menentukan kepada keberhasilan klien pemasyarakatan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci: Komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan, Proses Bimbingan, Bukittinggi

Abstract

The repetition of criminal acts or what is commonly known as a recidivist is increasingly happening. This is a special concern for law enforcement officers such as the Police, Prosecutors, Courts and Corrections. The penitentiary that is in the spotlight here is the Probation officer from the Correctional Center. PK is a correctional officer who carries out the task of guiding correctional clients referred to as Probation officers (PK). During the implementation of the mentoring process, communication plays an important role in the success of a guidance. PK communication experience with correctional clients in the guidance process is an experience that is worth researching. The purpose of the research is how to communicate with the Correctional Counselor (PK) with the correctional client during the implementation of the mentoring process at the Class II Penitentiary in Bukittinggi. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach. The phenomenology used in this study is the phenomenology of Edmund Husserl. The guidance process carried out to correctional clients at the Class II Bukittinggi Correctional Center has one goal so that

correctional clients can return to the midst of society properly and do not repeat criminal acts. Communication that is built in the guidance process is interpersonal communication. Success in forming interpersonal communication is found in the communicator in this case is PK. PK must be able to build closeness so that the guidance process goes well so that it can bring changes to correctional clients so that they do not commit criminal acts again. Therefore, it is necessary to improve the quality of PK, so that it can provide the best experience for correctional clients who need guidance. Because quality PK human resources will determine the success of correctional clients not to repeat their actions.

Keywords: *Community Counseling Communication, Guidance Process, Bukittinggi*

PENDAHULUAN

Fenomena pengulangan tindak pidana oleh klien masyarakat yang diberikan program reintegrasi dalam bentuk Asimilasi Rumah, Pembebasan Bersyarat (PB) ataupun Cuti Bersyarat (CB) bukanlah isapan jempol semata. Pengulangan tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah Residivis semakin marak terjadi. Hal ini menjadi suatu perhatian khusus bagi aparat penegak hukum seperti; Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Masyarakat. Masyarakat yang menjadi sorotan disini adalah Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat.

Pembimbing Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PK, dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) memiliki peran yang sangat strategis, yakni memiliki tugas dan fungsi bimbingan masyarakat dalam tahap proses dan pasca peradilan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana (Balitbang, 2018:1). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 8 ayat (1) tentang Masyarakat, menyebutkan bahwa PK adalah salah satu bagian dari petugas masyarakat yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan bimbingan warga binaan masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM dijelaskan bahwa bimbingan yang dilakukan oleh PK meliputi penelitian masyarakat, pendampingan, bimbingan dan pengawasan klien masyarakat baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial.

Adapun Balai Masyarakat yang dipilih dalam penelitian adalah Balai Masyarakat Kelas II Bukittinggi. Balai Masyarakat Kelas II Bukittinggi memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 3 (tiga) kota dan 8 (delapan) kabupaten yaitu, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, pasal 1 angka 4 tentang Masyarakat, menyebutkan bahwa Balai masyarakat (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien masyarakat. Klien masyarakat merupakan seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 Angka 9). Adapun salah satu peran BAPAS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999, Pasal 1 Angka 6 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Masyarakat adalah petugas masyarakat yang melaksanakan tugas bimbingan klien masyarakat disebut sebagai Pembimbing Masyarakat (PK). Selama pelaksanaan proses bimbingan, komunikasi berperan penting terhadap keberhasilan suatu bimbingan.

Pengalaman komunikasi PK dengan klien masyarakat dalam proses bimbingan merupakan pengalaman yang layak diteliti. Kemampuan komunikasi efektif sangat diperlukan oleh setiap petugas Pembimbing Masyarakat (PK). Kemampuan komunikasi efektif bukanlah kemampuan bawaan dari lahir, melainkan perlu untuk dipelajari. Tubbs & Moss (1999:9) menyebutkan bahwa komunikasi masih penting untuk dipelajari karena kuantitas tidak menjamin kualitas. Meskipun setiap manusia dapat berkomunikasi, tetapi kemampuan komunikasi efektif harus tetap dipelajari sehingga setiap manusia perlu mengembangkan kemampuan komunikasi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Berkaitan dengan hal itu, Tubbs & Moss (1999:9) juga menyebutkan bahwa, seorang dokter juga dituntut untuk

mengembangkan kemampuan komunikasi untuk menciptakan kepercayaan dan kesediaan pasien. Hal tersebut juga berlaku pada seorang PK yang juga sangat dituntut untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya guna menciptakan kepercayaan dan kesediaan klien masyarakat.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Anzilna dan Wiwid yang berjudul "Komunikasi Antara Petugas Pembinaan Warga Binaan dalam Proses Pembinaan Pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Semarang". Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan komunikasi yang terjadi antara Petugas Pembina dan Warga Binaan dalam proses pembinaan pada Lembaga Masyarakat perempuan kelas IIA Semarang. Hasil dari penelitiannya adalah komunikasi dan keterbukaan yang dilakukan oleh warga binaan dipengaruhi oleh petugas pembina. Komunikasi yang terjadi selama pembinaan memiliki intensitas tinggi tetapi sebagian besar hanya mengenai pekerjaan serta adanya kekuasaan yang dimiliki oleh petugas membuat kedalaman hubungan antara mereka tidak terlalu dalam.

Proses bimbingan antara Pembimbing Masyarakat (PK) dengan klien masyarakat, merupakan salah satu upaya untuk menyadarkan klien masyarakat agar tidak mengulangi tindak pidananya. Proses bimbingan tersebut dilakukan secara langsung dimana terdapat komunikasi langsung yang terdiri dari dua belah pihak yang memungkinkan keduanya menangkap reaksi secara langsung baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi yang terjadi termasuk ke dalam komunikasi interpersonal yang mana komunikator dapat mengetahui tanggapan komunikan saat itu juga. Sebagaimana Ejang (2009:68) menyebutkan komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi yang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal.

Saat proses komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat (PK) dengan klien masyarakat, harus diperhatikan bagaimana komunikasi tersebut terjalin. Terdapat beberapa faktor pendukung agar komunikasi interpersonal berjalan dengan baik, yakni percaya (trust), sikap suportif, dan sikap terbuka (Rakmat, 2007:129-133). Joseph A. Devito (1997:259) menyebutkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yakni; keterbukaan, sikap empati, sikap mendukung, sikap positif dan kesetaraan. Faktor-faktor ini tentunya menjadi perhatian PK dalam berkomunikasi dengan klien masyarakat agar tujuan dari pembimbingan dapat tercapai.

Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi Pembimbing Masyarakat (PK) dengan klien masyarakat selama pelaksanaan proses pembimbingan di Balai Masyarakat Kelas II Bukittinggi?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengalaman komunikasi yang terjadi antara Pembimbing Masyarakat (PK) dengan klien masyarakat selama pelaksanaan proses pembimbingan di Balai Masyarakat Kelas II Bukittinggi.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis merupakan paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Melalui paradigma konstruktivis, peneliti dapat mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Patton (2002:96-97), bahwa penelitian dengan paradigma ini memandang individu memiliki pengalaman unik, sehingga penelitian ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut. Paradigma konstruktivis menganggap realitas sosial yang diamati seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang dilakukan oleh kaum positivis.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dari

sesuatu yang sudah menjadi atau disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan fenomena. Fenomenologi mempelajari fenomena yang tampak dan bagaimana penampakkannya. Adapun fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi Edmund Husserl. Husserl menyebutkan bahwa melalui fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya (Kuswarno, 2009:10). Husserl mengajak kembali pada sumber atau realitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu diperlukan metode "reduksi" atau menempatkan fenomena dalam keranjang (*bracketing*) atau tanda kurung. Melalui reduksi ini, terjadi penundaan upaya penyimpulan sesuatu dari setiap prasangka terhadap realitas. Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah reduksi eidetis, reduksi fenomenologi, dan reduksi transedental (Kuswarno,2009:10).

Sumber data dalam penelitian adalah para informan yang berhubungan dengan fenomena ini yakni Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Kriteria informan dalam penelitian fenomenologi menurut Creswell yakni individu yang telah mengalami fenomena yang akan diteliti. Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini adalah; dan telah memiliki pengalaman dalam memberikan bimbingan kepada klien masyarakat. Adapun alasan pengambilan kriteria ini karena Peneliti berasumsi bahwa dalam jangka waktu tersebut, informan telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian. Teknik ini dipilih karena esensi dari fenomena yang diamati dapat diceritakan dari sudut pandang orang pertama (orang yang mengalami secara langsung). Wawancara langsung dalam penelitian fenomenologi dilakukan secara informal, interaktif (percakapan), dan melalui pertanyaan-pertanyaan dan jawaban terbuka. Wawancara dibuat mengalir, tanpa terpaku dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, sesuai dengan respon atau jawaban responden.

Adapun teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis fenomenologi Edmund Husserl. Husserl mengemukakan bahwa perlunya reduksi (penyaringan) agar peneliti sampai pada benda itu sendiri. Terdapat tiga reduksi yang berlaku dalam tindakan *epoche* yakni; reduksi eidetik, reduksi fenomenologi, dan reduksi transedental. Reduksi eidetik bertujuan untuk mengungkap struktur dasar (*eidotes*) dari suatu fenomena murni atau yang telah dimurnikan. Reduksi ini menunda sifat-sifat yang aksidental atau eksistensial dari objek sehingga yang tersisa hanya pengalaman itu sendiri. Aksidental atau eksistensial bersifat tidak tetap, dan tidak pasti (Sobur: 2020:54). Oleh karena itu, dalam reduksi ini jangan dulu mempertimbangkan atau mengindahkan apa yang sifatnya aksidental atau eksistensial, namun perhatian diarahkan hanya pada esensinya atau hakikatnya.

Reduksi selanjutnya adalah reduksi fenomenologi, yakni reduksi yang bertujuan membendung segenap parasangka subjek mengenai objek yang esensinya ingin dicari. Reduksi ini hanya menyodorkan kesadaran sendiri sebagai sebuah fenomena. Reduksi fenomenologi diarahkan pada subjek sehingga yang tersisa hanya kesadaran sendiri. Reduksi ini dimaksudkan untuk menyaring pengalaman sehingga orang sampai pada fenomena semurni-murninya (Sobur, 2020:54). Reduksi terakhir yakni reduksi transedental, yakni reduksi yang dimaksudkan sampai pada subjek murni. Seluruh data yang tidak berhubungan dengan kesadaran murni harus dikurungkan, dengan kata lain pada tahap ini 'kembali pada objek'(Sobur, 2020:54).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalaman Komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien Masyarakat dalam Proses Bimbingan.

Kegiatan dan proses bimbingan yang dilakukan oleh seorang PK terhadap klien masyarakat tentunya menjadi hal yang penting. Sehingga PK memiliki pengalaman dalam membimbing klien masyarakat. Proses pembimbingan yang dilakukan kepada klien masyarakat di Balai Masyarakat Kelas II Bukittinggi memiliki tujuan salah

satunya agar klien pemasyarakatan dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dengan baik serta tidak mengulangi tindak pidana.

JD adalah salah satu PK di Bapas Kelas II Bukittinggi yang telah menjalankan tugasnya sebagai PK selama 12 (dua belas) tahun dari tahun 2009. Begitupun dengan informan yang berinisial AA yang telah menjalankan tugas PK sejak tahun 2012 hingga saat ini. Keyakinan peneliti terhadap pengalaman kedua PK ini dalam komunikasi dengan klien pemasyarakatan tentunya bukan asal-asalan saja. Hal ini dikarenakan bahwa dalam penelitian fenomenologi hanya dapat diamati secara langsung dari orang yang mengalami hal tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan Asih (2005:77) bahwa fenomenologi murni adalah data asli yang dapat ditangkap oleh kesadaran manusia. Oleh karenanya pengalaman yang diperoleh adalah benar sebab langsung diperoleh dari subjek yang mengalami hal itu sendiri.

Komunikasi yang dibangun dalam proses bimbingan adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dalam Hardjana (2003:85) adalah interaksi tatap muka antar dua orang atau beberapa orang, dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula. Sejalan dengan Mulyana (2008:73) bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal.

Keberhasilan dalam membentuk komunikasi interpersonal terdapat pada komunikator dalam hal ini adalah PK. PK harus dapat memahami setiap klien pemasyarakatan yang memiliki kepribadian berbeda satu dengan yang lain. PK harus mampu membangun kedekatan agar proses bimbingan berjalan dengan baik sehingga dapat membawa perubahan terhadap klien pemasyarakatan sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi. Sebagaimana pengalaman dari informan JD dan AA bahwa dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan diperlukan kemampuan membangun kedekatan dengan klien pemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar klien pemasyarakatan merasakan adanya kenyamanan, rasa dihargai dan didengarkan. Melalui bimbingan dengan membangun kedekatan dalam berkomunikasi, maka diharapkan klien pemasyarakatan memiliki harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah melaksanakan pembimbingan.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Harliyanti dengan rekan-rekannya yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice*, terhadap pendampingan, pembimbingan, Pengawasan anak pelaku tindak pidana belum efektif, disebabkan masih terdapat kendala sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas dalam penerapan *restorative justice* (Harliyanti, Renggong, and Haris 2021).

Terdapat beberapa penghambat PK dalam penerepan *restorative justice* yakni; kurangnya sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, wilayah kerja yang luas, kurangnya sarana dan prasarana, dukungan masyarakat dalam penerapan *Restorative Justice*, kurangnya partisipasi korban, orang tua dan pelaku, dan lambatnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak pelaku tindak pidana.

Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kualitas PK, sehingga dapat memberikan pengalaman yang terbaik juga untuk klien pemasyarakatan yang memerlukan bimbingan. Artinya pengalaman PK dalam penelitian itu juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harliyanti. Sebab sumber daya manusia PK yang berkualitas akan menentukan kepada keberhasilan klien pemasyarakatan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Makna Esensial-Transedental dari Pengalaman PK-Kepuasan Bati

Bagi seorang PK menjalankan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan, terdapat kepuasan tersendiri. Dalam hal ini membimbing seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum bukanlah hal yang mudah. Kepuasan batin yang dirasakan oleh PK dilihat dari hasil yang telah dilakukan selama proses pembimbingan. Ketika klien

pemasyarakatan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan baik dan memiliki kehidupan serta penghidupan yang lebih baik, tentunya menjadi kepuasan bagi PK.

KESIMPULAN

Komunikasi yang dibangun dalam proses bimbingan adalah komunikasi interpersonal. Proses pembimbingan yang dilakukan kepada klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi memiliki tujuan salah satunya agar klien pemasyarakatan dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dengan baik serta tidak mengulangi tindak pidana. Keberhasilan dalam membentuk komunikasi interpersonal terdapat pada komunikator dalam hal ini adalah PK. PK harus dapat memahami setiap klien pemasyarakatan yang memiliki kepribadian berbeda satu dengan yang lain. PK harus mampu membangun kedekatan agar proses bimbingan berjalan dengan baik sehingga dapat membawa perubahan terhadap klien pemasyarakatan sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kualitas PK, sehingga dapat memberikan pengalaman yang terbaik juga untuk klien pemasyarakatan yang memerlukan bimbingan. Sebab sumber daya manusia PK yang berkualitas akan menentukan kepada keberhasilan klien pemasyarakatan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, I. D. (2015). Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara “Kembali Ke Fenomena.” *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(2), 75–80. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i2.164>
- Balitbang Hukum. 2018. *Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan* (Jakarta: Balaiyangkumham Pres), <https://ebook.balitbangham.go.id/category/sumber-daya-manusia>.
- Devito, Joseph. 1997. *Komunikasi Antarmanusia*. Jakarta: Professional Books.
- Enjang, AS. 2009. *Komunikasi Konseling*. Bandung: Nuansa.
- Harliyanti, Harliyanti, Ruslan Renggong, and Abd. Hamid Haris. 2021. “Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 2, no. 2: 88–93. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.420>.
- Kementerian Hukum dan HAM R.I, *Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan* (Indonesia, 2018)
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi : Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja
- Patton, M.Q. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods. Third Edition*. California: Sage Publications.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Rakhmad, Jalaluddin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tubbs, Stewart L & Sylvia Moss, *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi*, Editor Deddy Mulyana. 2005. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.\